

JenisBerkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Februari 12/03
Judul	: Catatan APBD Riau 2018(3)	Tanggal	: 12 Februari 2018
Sub Judul	: Provinsi Perlu Lebih Efisien	Tahun	: 2018
		Penulis	: *FITRA RIAU*

**Harus Lebih Hemat Anggaran**

Belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau, dapat dikatakan belum maksimal dalam melakukan penghematan anggaran dalam merencanakan APBD tahun 2018. Hal itu dapat dilihat dari beberapa item anggaran yang menurut Fitra Riau belum efisien. Padahal sebenarnya pemerintah daerah masih dapat menghemat anggaran untuk belanja –belanja tersebut.

Tahun ini, melalui APBD 2018 terdapat 9 item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi Riau. Selain belanja perjalanan Dinas, maka minum, juga ada anggaran lainnya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan. Bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah.

“Memang, jika dibandingkan dengan tahun 2017, 8 dari 9 item anggaran tersebut mengalami penurunan alokasi, hanya ada satu item anggaran yang meningkat yaitu pembangunan gedung kantor pemerintah, peningkatannya hingga mencapai 100% dari tahun sebelumnya”.

NO	JENIS BELANJA	2017	2018
1	Belanja Perjalanan Dinas	513,188,237,655	426,104,283,368
2	Belanja Makan dan Minum	173,521,816,382	130,789,806,000
3	Belanja Publikasi	24,705,881,610	17,236,733,750
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,347,715,100	36,825,369,202
5	Pengharum Ruangan	2,235,575,000	1,909,676,800
6	Dekorasi, Dokumentasi, Logistrik IRT, Publikasi	51,096,080,748	33,047,805,215
7	Pakaian Dinas	35,937,144,899	42,179,387,998
9	Belanja Pembangunan Gedung Kantor	63,315,179,392	114,946,479,410

Item item belanja tersebut, pada prinsipnya terjadi penurunan dari alokasi belanja tahun 2017. Akan tetapi Fitra Riau menilai bahwa anggaran tersebut semestinya dapat diefisienkan lagi agar tidak mengganggu belanja untuk kepentingan pelayanan publik lainnya. Seperti anggaran infrastruktur tahun 2018 berkurang hampir 50% dari belanja tahun 2017.

Selain itu juga anggaran untuk pembangunan gedung sekolah, tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 156,7 Milyar, tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp. 124,4 Milyar. “Sebenarnya jika anggaran diatas direncanakan lebih efisien maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi”.

Salah satu yang mesti harus di efisienkan lebih adalah, seperti Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah harusnya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas. Hampir semua kegiatan yang ada di APBD, seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah. Meskipun jika dilihat dari tujuan kegiatan tersebut untuk dilakukan didalam daerah. akan tetapi tertera alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah. “Hal-hal yang begitu tentunya mesti harus diperhatikan, khususnya bagi Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan yang merangkul dari masing-masing OPD.

Kasus yang terjadi di Dinas Dispenda Riau yang menerat beberapa pejabat dalam kasus perjalanan dinas, tentunya menjadi pelajaran. Bahwa anggaran perjalanan dinas sangat mudah untuk di manipulasi.

**Anggaran Kebutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur**

**APBD UNTUK KEBUTUHAN KDH-WKDH**

No	Belanja Kepala Daerah	2017	2018
1	Perjalanan Dinas Gubernur	1,800,000,000	1,350,000,000
2	Perjalanan Dinas Wakil Gubernur	1,800,000,000	1,000,000,000
3	Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah	1,800,000,000	1,000,000,000
4	Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur	3,900,000,000	3,884,960,000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Gubernur	3,200,000,000	3,182,080,000
6	peningkatan pelayanan rumah tangga gubernur	1,200,000,000	947,500,000
7	peningkatan pelayanan rumah tangga wakil gubernur	1,000,000,000	762,250,000
<b>TOTAL</b>		<b>14,700,000,000</b>	<b>12,126,790,000</b>

Salah satu yang juga menjadi perhatian adalah alokasi anggaran untuk Kepala daerah (KD) dan wakil kepala daerah (WKD). tahun 2018 ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12,1 Milyar, dengan 7 item anggaran. Mulai dari perjalanan dinas hingga peningkatan pelayanan rumah tangga. Meskipun kondisinya sama yaitu ada penurunan dari Rp. 14,7 M menjadi Rp. 12,1 Milyar.